

E. RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana dapat terjadi sewaktu – waktu tanpa bisa diprediksikan sehingga sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini pemerintah untuk menyusun sebuah perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk merencanakan langkah – langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana, melaksanakan tanggap darurat bencana saat bencana terjadi, maupun untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pemerintah Kota Malang menyadari pentingnya penanggulangan bencana untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 44 tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang sebagai Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang terbaru telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, setiap daerah wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

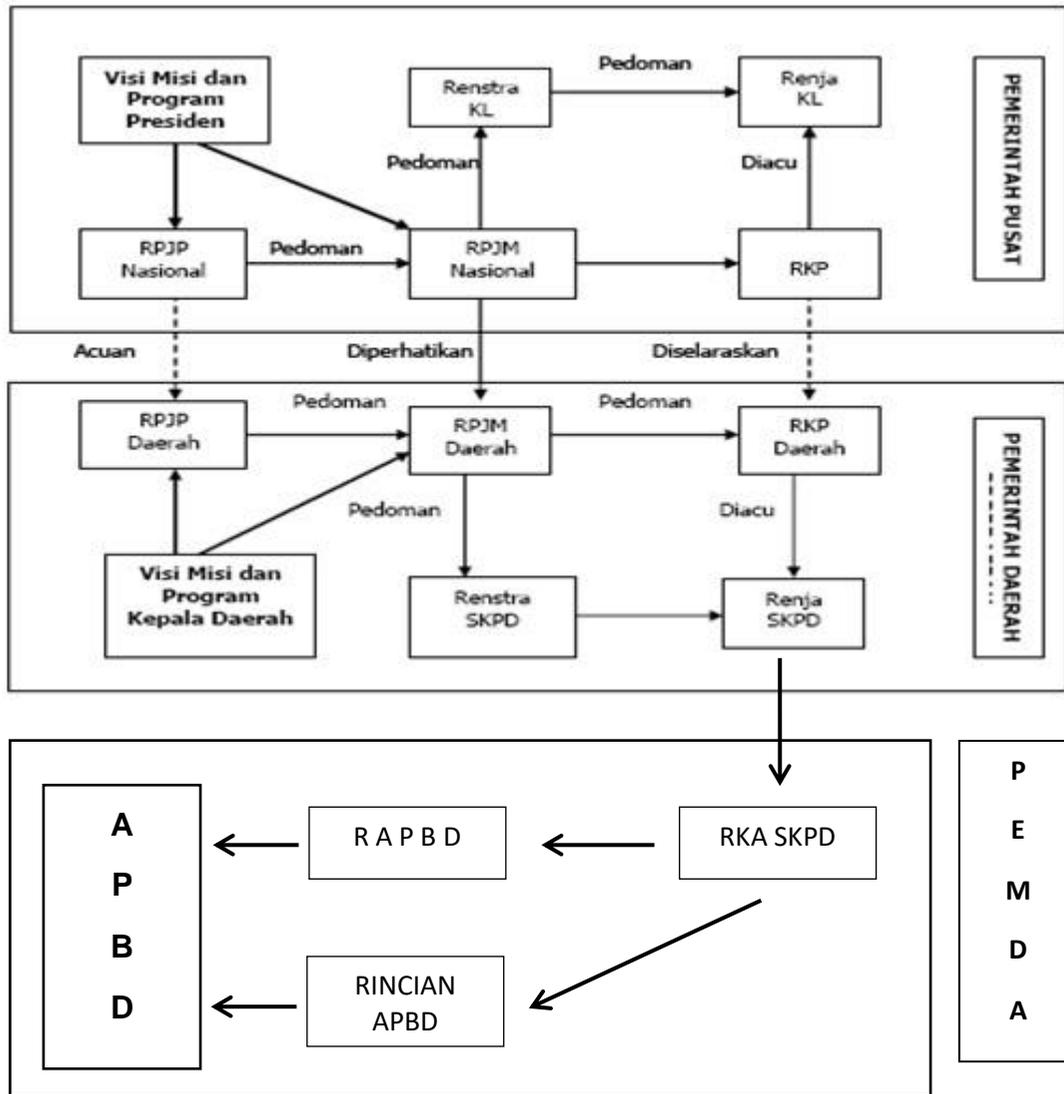
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut meliputi rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Adapun hubungan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1. Hubungan Dokumen – Dokumen Perencanaan



Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan RKP. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Rencana Kerja juga diharapkan menyatukan persepsi, strategi seluruh aparat dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang dalam membina, melayani, memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri, serta dapat mengevaluasi kinerja BPBD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan dapat memacu kinerja

pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada BPBD.

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Adapun tahapan penyusunannya adalah sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan, meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; (b) orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. penyusunan rancangan awal, dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: (a) pendahuluan; (b) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; (c) tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; (d) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan (e) penutup.
- c. penyusunan rancangan, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah (berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah) dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala BAPPEDA Provinsi (paling lambat minggu pertama bulan Maret) dan Kepala BAPPEDA Kota (paling lambat minggu ketiga bulan Maret) untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja

Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

- e. perumusan rancangan akhir, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Perumusan dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- f. penetapan, rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dimaksud menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Strategis BPBD Kota Malang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Malang, serta setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Malang.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, keberadaan Renja BPBD Kota Malang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Kota Malang yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kota Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renja BPBD) Kota Malang Tahun 2023 adalah penjabaran dari perencanaan strategis (Renstra) untuk memberikan gambaran rencana kerja yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang beserta pagu anggaran indikatif yang telah ditentukan oleh Bappeda untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran pada tahun yang akan datang (Tahun 2023).

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Tahun 2023 adalah:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang perencanaan;

- b. Sebagai acuan BPBD melaksanakan RKPD Kota Malang tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Malang.
- c. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan BPBD Kota Malang selama tahun 2023;
- d. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen;
- e. Sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang sebagai dasar penyusunan APBD pada tahun anggaran 2023;
- f. Mencapai Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Malang;
- g. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi BPBD Kota Malang dan instansi terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum: Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3 Maksud dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan: Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs;
4. Tantangan yang berasal dari luar BPBD tetapi masih ada keterkaitan dengan penanganan bencana (rencana nasional dari BNPB) serta peluang yang ada dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; (telaahan terhadap rancangan awal RKPD).
4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misalnya:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
2. Pencapaian SDGs,
3. Pengentasan kemiskinan,
4. Pencapaian SPM,
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
6. Pengembangan daerah terisolir,
7. Dsb.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tabel form Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun Anggaran 2023 beserta prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

1. Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan di tahun 2021;

Adapun program/kegiatan/sub-kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:

Tabel 2.1
Realisasi program / kegiatan / sub-kegiatan
yang tidak memenuhi target kinerja tahun 2021

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	95	-	-
2	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	65,60%	65,60%
3	Sub-kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	4.000 orang	675 orang	16,88%

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	55,43%	55,43%
5	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	89,60%	89,60%
6	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	10%	0,00%	0,00%
7	Sub-kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Perjanjian Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	3 MOU	1 MOU	33,33%
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	80	-	-
9	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerapan Anggaran	90%	88,74%	98,61%
10	Sub-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	16 Orang	14 Orang	87,50%

2. Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan di tahun 2021;

Adapun program/kegiatan/sub-kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Program / Kegiatan / Sub-kegiatan
yang memenuhi target kinerja tahun 2021

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sub-kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
2	Sub-kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	100 KK	100 KK	100,00%

E.II-17

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100%	100,00%	100,00%
4	Sub-kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
5	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
6	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
7	Sub-kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKM yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
8	Sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	14 Kali	100,00%
9	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
10	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	100,00%
11	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	3 Jenis	3 jenis	100,00%
12	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan – undangan yang disediakan	2 Jenis	2 jenis	100,00%
13	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	12 bulan	100,00%
14	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100,00%	100,00%
15	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang yang dipelihara	24 Unit	24 Unit	100,00%
16	Sub-kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	19 Jenis	19 Unit	100,00%
17	Sub-kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	825 m2	825 m2	100,00%

3. Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan di tahun 2021;

Tabel 2.3
Realisasi Program / Kegiatan / Sub-kegiatan
yang melebihi target kinerja Tahun 2021

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sub-kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	540 Orang	556 Orang	102,96%
2	Sub-kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	10.000 Orang	26.200 orang	262,00%
3	Sub-kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya	14 Orang	20 Orang	142,86%
4	Sub-kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	250 Orang	1.018 Orang	407,20%
5	Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	250 Orang	1.100 Orang	440,00%
6	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur BPBD yang mendapatkan fasilitas pelatihan dan perlengkapan pegawai	100%	111,76%	111,76%
7	Sub-kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibeli	52 Pasang Sepatu	62 Pasang Sepatu	119,23%
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercukupan sarana prasarana kantor	100%	181,58%	181,58%
9	Sub-kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	9 Jenis	180,00%
10	Sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 Kali	47 kali	235,00%
11	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan yang tersedia	15%	18,75%	125,00%
12	Sub-kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dibeli	20 Jenis	25 jenis	125,00%

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya administrasi surat menyurat	100%	105,17%	105,17%
14	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	1.200 surat	1262 Surat	105,17%

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tidak terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan di Tahun 2021;

Tabel 2.4
Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, tidak terpenuhinya, atau melebihi target kinerja tahun 2021

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Faktor-faktor Ketidaktercapaian atau Melebihi Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	95	-	-	Indeks Risiko Bencana masih dalam proses perhitungan d BNPB
2	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	65,60%	65,60%	Kurangnya sumber daya untuk menjangkau seluruh warga negara di wilayah rawan bencana
3	Sub-kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi / sosialisasi rawan bencana	4.000 orang	675 orang	16,88%	Terkendala pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga sulit mengumpulkan warga
4	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	55,43%	55,43%	Kurangnya sumber daya untuk menjangkau seluruh warga negara di wilayah rawan bencana
5	Sub-kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	540 Orang	556 Orang	102,96%	Jumlah peserta pelatihan dapat lebih banyak dengan anggaran yang ada
6	Sub-kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	10.000 Orang	26.200 orang	262,00%	Jumlah user yang berinteraksi dengan platform digital BPBD meningkat signifikan saat bencana lebih banyak terjadi
7	Sub-kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya	14 Orang	20 Orang	142,86%	Jumlah peserta dapat lebih banyak dari rencana dengan anggaran yang ada

E.II-20

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Faktor-faktor Ketidaktercapaian atau Melebihi Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	89,60%	89,60%	Ada banyak korban bencana banjir genangan yang relatif sulit untuk dilakukan penyelamatan dan evakuasi karena sifat banjir genangan yang sesaat dan rutin saat hujan
9	Sub-kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	250 Orang	1.018 Orang	407,20%	Target korban bencana dibuat berdasarkan rata-rata tahunan namun saat 2021 ada banyak korban dari Banjir bandang dan banjir genangan
10	Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	250 Orang	1.100 Orang	440,00%	Target korban bencana dibuat berdasarkan rata-rata tahunan namun saat 2021 ada banyak korban dari Banjir bandang dan banjir genangan
11	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	10%	0,00%	0,00%	UU tentang Bencana akan dilakukan perubahan yang masih berproses di DPR RI
12	Sub-kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Perjanjian Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	3 MoU	1 MoU	33,33%	Saat pandemi Covid-19 sulit untuk menjalin koordinasi intensif guna pembentukan MoU
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	80	-	-	Belum dilakukannya perhitungan nilai SAKIP oleh Inspektorat
14	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerapan Anggaran	90%	88,74%	98,61%	efisiensi anggaran dari gaji dan tunjangan (ada 3 orang pejabat struktural yang belum diisi) dan efisiensi pelaksanaan acara
15	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur BPBD yang mendapatkan Fasilitas pelatihan dan perlengkapan pegawai	100%	111,76%	111,76%	Jumlah perlengkapan pegawai yang dibeli dapat lebih banyak dengan anggaran yang ada
16	Sub-kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibeli	52 Pasang Sepatu	62 Pasang Sepatu	119,23%	Jumlah sepatu yang dibeli dapat lebih banyak dengan anggaran yang ada
17	Sub-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	16 Orang	14 Orang	87,50%	Anggaran yang ada belum mencukupi untuk mengikutsertakan peserta sesuai rencana
18	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercukupan sarana prasarana kantor	100%	181,58%	181,58%	Jumlah sarana prasarana yang dibeli dapat lebih banyak dengan anggaran yang ada
19	Sub-kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	9 Jenis	180,00%	Jumlah komponen listrik yang dibeli dapat lebih banyak dengan anggaran yang ada

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Faktor-faktor Ketidaktercapaian atau Melebihi Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 Kali	47 kali	235,00%	Jumlah perjalanan dinas dapat dimaksimalkan dengan anggaran yang ada
21	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan yang tersedia	15%	18,75%	125,00%	Jumlah peralatan kantor yang dibeli dapat lebih banyak dengan anggaran yang ada
22	Sub-kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dibeli	20 Jenis	25 jenis	125,00%	Jumlah peralatan bencana yang dibeli dapat lebih banyak dengan anggaran yang ada
23	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya administrasi surat menyurat	100%	105,17%	105,17%	Jumlah surat keluar lebih banyak dari yang diperkirakan
24	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	1.200 surat	1.262 Surat	105,17%	Jumlah surat keluar lebih banyak dari yang diperkirakan

5. Implikasi yang timbul terhadap tidak tercapainya beberapa target capaian Renstra Perangkat Daerah di tahun 2021.

Ketidaktercapaian beberapa target kinerja akan memiliki implikasi pada beberapa hal yakni antara lain:

- a. Ketidaktercapaian pada target capaian kinerja yang merupakan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan menyebabkan rendahnya penilaian Kota Malang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dapat berpengaruh negatif terhadap penilaian performa Pemerintah Kota Malang;
- b. Ketidaktercapaian pada target kinerja dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan dan penghargaan masyarakat dan stakeholder kebencanaan terhadap kemampuan BPBD dalam melaksanakan manajemen bencana di Kota Malang sehingga dalam jangka menengah dan panjang dapat menyebabkan semakin berkurangnya efektifitas BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Malang;

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
 - a. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
 - b. Dalam penyusunan jadwal kegiatan perlu memperhatikan faktor eksternal;
 - c. Perlu melakukan langkah – langkah koordinatif dan strategis dalam optimalisasi pagu anggaran agar dapat mendanai pencapaian target – target kinerja secara maksimal;
 - d. Dilakukan evaluasi setiap triwulan agar rencana yang dilakukan dapat dievaluasi secara berkala agar mencapai target yang ditentukan.
 - e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam internal BPBD dan dengan para pemangku kepentingan yang terkait penanggulangan bencana untuk dapat mewujudkan Malang Kota Tangguh Bencana dan sekaligus dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana.

B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Sampai dengan Triwulan II

1. Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan di tahun 2022 sampai dengan Triwulan II; Adapun program/kegiatan/sub-kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:

Tabel 2.5
 Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan
 yang tidak memenuhi target kinerja tahun 2022 s.d Triwulan II

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	26.94%	26.94%
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	1.000 Orang	312 Orang	31.20%
3.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	26.17%	26.17%
4.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	690 Orang	546 Orang	79.13%
5.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	30.72%	30.72%
6.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	200 Orang	174 Orang	87.00%
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	25.00%	25.00%
8.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	50.00%	50.00%
9.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%
10.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	25.00%
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	4 Dokumen	3 Dokumen	75.00%

E.II-24

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKM yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%
13.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90%	0.00%	0.00%
14.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	7 Kali	46.54%
15.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	0	0.00%
16.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	94.29%	94.29%
17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 Kali	18 kali	90.00%
18.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	92.45%	92.45%
19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	5 Bulan	41.67%
20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	1.200 surat	477 surat	39.75%
21.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label Barang Milik Daerah (BMD)	250 Unit	37 Unit	14.80%
22.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	47.79%	47.79%
23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	24 Unit	8 jenis	33.33%
24.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	20 Unit	0	0.00%
25.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	19 Unit	6 Unit	31.58%
26.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	50 m2	40 m2	80.00%

2. Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan di tahun 2022 sampai dengan Triwulan II; Adapun program/kegiatan/sub-kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Realisasi Program / Kegiatan / Sub-kegiatan
yang memenuhi target kinerja tahun 2022 s.d Triwulan II

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	50 kk	50 kk	100%
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis	100%
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis	100%
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	100%
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	100%

3. Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan di tahun 2022 sampai dengan Triwulan II;

Tabel 2.7
Realisasi Program / Kegiatan / Sub-kegiatan
yang melebihi target kinerja Tahun 2022 s.d Triwulan II

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	90	88.29	101.94
2.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	20.000 Orang	28.640 Orang	143.20%
3.	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	200 Orang	218 Orang	109.00%

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tidak terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan di Tahun 2022 sampai dengan triwulan II;

Tabel 2.8

Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, tidak terpenuhinya, atau melebihi target kinerja tahun 2022 s.d Triwulan II

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Faktor-faktor penyebab belum tercapaiannya target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	26.94%	26.94%	Kurangnya sumber daya untuk menjangkau seluruh warga negara di wilayah rawan bencana
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	1.000 Orang	312 Orang	31.20%	Dikarenakan masih dalam nuansa pandemi COVID-19 sehingga sulit mengumpulkan warga
3.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	26.17%	26.17%	Kurangnya sumber daya untuk menjangkau seluruh warga negara di wilayah rawan bencana
4.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	690 Orang	546 Orang	79.13%	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
5.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	30.72%	30.72%	Ada banyak korban bencana banjir genangan yang relatif sulit untuk dilakukan penyelamatan dan evakuasi karena sifat banjir genangan yang sesaat dan rutin saat hujan
6.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	200 Orang	174 Orang	87.00%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin saat terjadi bencana
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	25.00%	25.00%	Masih dalam tahap P-RKPD dan Dokumen laporan keuangan disusun di bulan september - oktober

E.II-27

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Faktor-faktor penyebab belum tercapaiannya target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	50.00%	50.00%	Masih dalam tahap P-RKPD
9.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%	Masih dalam tahap penyusunan dokumen Rancangan Awal Perubahan Renja Tahun 2022
10.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	25.00%	Masih dalam tahap P-RKPD
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	4 Dokumen	3 Dokumen	75.00%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin untuk evaluasi bulanan dan triwulan
12.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKM yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%	SKM dilaksanakan di triwulan III bulan juli - Agustus untuk semester pertama Tahun 2022
13.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90%	0.00%	0.00%	Dokumen laporan keuangan disusun di bulan september - oktober
14.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	7 Kali	46.54%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin
15.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	0	0.00%	Dokumen laporan keuangan disusun di bulan september - oktober
16.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	94.29%	94.29%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin untuk perjalanan dinas
17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 Kali	18 kali	90.00%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin
18.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	92.45%	92.45%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin
19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	5 Bulan	41.67%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin
20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	1.200 surat	477 surat	39.75%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Faktor-faktor penyebab belum tercapaiannya target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label Barang Milik Daerah (BMD)	250 Unit	37 Unit	14.80%	Menyesuaikan dengan pengadaan BMD
22.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	47.79%	47.79%	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah (BMD) banyak dilaksanakan di bulan Juni
23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	24 Unit	8 jenis	33.33%	Kegiatan dilaksanakan di triwulan I, II, III, IV
24.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	20 Unit	0	0.00%	Pemeliharaan dilaksanakan pada triwulan III
25.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	19 Unit	6 Unit	31.58%	Pemeliharaan dilaksanakan pada triwulan II, III
26.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	50 m2	40 m2	80.00%	Pemeliharaan dilaksanakan pada bulan mei s.d Juni

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah, maka pada Perubahan Renja tahun 2022 perlu dilakukan:

- a. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
- b. Dilakukan evaluasi setiap bulan agar rencana yang dilakukan dapat dievaluasi secara berkala agar mencapai target yang ditentukan.

- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam internal BPBD dan dengan para pemangku kepentingan yang terkait penanggulangan bencana untuk dapat mewujudkan Malang Kota Tangguh Bencana dan sekaligus dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada sub bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45 / 453 / 35.73.112 / 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45 / 234 / 35.73.112 / tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 – 2023, dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 2.9
Pengukuran Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Malang
Tahun 2021

Kinerja Utama Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Disaster Resilience Scorecard	72	54	75%
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	50%	83,44%	166,88%
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	79	-	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 yakni:

1. Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana

Target IKU ini memiliki indikator Disaster Resilience Scorecard dimana dapat dilihat dalam tabel 2.5 bahwa BPBD Kota Malang belum berhasil mencapai target hanya tercapai angka 54 dari target angka 72. Belum tercapainya target indikator Disaster Resilience Scorecard disebabkan Konsep Kota Tangguh belum terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Kota, Belum adanya insentif/disinsentif bagi sektor-sektor terkait untuk menerapkan konsep kota Tangguh, Masih lemahnya partisipasi publik dalam Pengurangan Risiko Bencana, Respon terhadap bencana belum terintegrasi antar pemangku kepentingan terkait dan Penanganan Pascabencana masih belum terstruktur dan terintegrasi antar pemangku kepentingan terkait.

2. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana

Target IKU ini memiliki indikator Persentase Masyarakat Sadar Bencana dimana dapat dilihat dalam tabel 2.5 bahwa BPBD Kota Malang berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu tercapai 83,44% dari target 50%. Tingginya tingkat capaian ini ditunjang oleh masifnya informasi tentang bencana Covid-19 yang disebarakan melalui media massa online dan offline yang membuat masyarakat semakin sadar akan bahaya bencana non alam Covid-19 di lingkungan mereka.

3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Target IKU ini memiliki indikator Nilai SAKIP dimana dapat dilihat dalam tabel 2.5 bahwa target Nilai SAKIP sebesar angka 79 ini belum dapat ditentukan capaiannya karena belum dilakukan penilaian oleh APIP dalam hal ini oleh Inspektorat Kota Malang.

Berkaitan dengan kinerja pelayanan penanggulangan bencana, pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen bencana termasuk dalam Urusan Wajib yang terkait pelayanan dasar yang mana masuk dalam bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada sub urusan bencana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada sub urusan bencana ini terdapat 3 (tiga) standar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah setiap tahunnya yaitu:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, dengan target capaian 100%;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan target capaian 100%;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan target capaian 100%.

Adapun capaian penerapan SPM yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Malang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Indikator
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana
Tahun 2021

No	IKK Outcome	Rumus	Target	Perhitungan	Capaian
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	X = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Y = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana $\frac{x}{y} \times 100\%$	100%	X = 160.250 jiwa Y = 244.282 jiwa	65,60%
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	X = Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Y = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana $\frac{x}{y} \times 100\%$	100%	X = 135.413 jiwa Y = 244.282 jiwa	55,43%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	X = Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana Y = Seluruh penduduk yang menjadi korban bencana $\frac{x}{y} \times 100\%$	100%	X = 16.669 jiwa Y = 18.604 jiwa	89,60%

Berikut dalam tabel 2.7 ditampilkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022:

Tabel 2.11
Tabel TC-29.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan / Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2021			Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun (2021	Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja s/d tahun berjalan (tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1	Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
1	05	Sub Urusan Bencana												
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	85	91.26	95	88.29	107.60%	90	88.29	96.27%		
1	05	03	2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	24.81%	100%	26.27%	26.27%	100.00%	26.94%	26.94%	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang disusun	3 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	0	2 dokumen	66.67%
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/ sosialisasi rawan bencana	19.000 orang	6.279 orang	4.000 orang	675 orang	16.88%	1.000 orang	987 orang	5.19%

E.II-33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan / Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2021			Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun (2021	Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja s/d tahun berjalan (tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 05 03 2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	18.59%	100%	24.46%	24.46%	100.00%	26.17%	26.17%
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2.710 Orang	888 orang	540 Orang	556 Orang	102.96%	690 orang	1.102 orang	40.66%
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	22.000 Orang	20.754 orang	10.000 Orang	26.200 orang	262.00%	10.000 orang	28.640 orang	130.18%
1 05 03 2.02 04	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya	78 Orang	0	14 Orang	20 Orang	142.86%	0	20 Orang	25.64%
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	400 KK	0	100 KK	100 KK	100.00%	50 KK	150 KK	37.50%

E.II-34

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2021			Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun (2021	Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja s/d tahun berjalan (tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1	05	03	2.03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	59.19%	100%	39.94%	39.94%	100.00%	30.72%	30.72%
						Rata-rata waktu tanggap (respon time) bencana	< 1 Jam							
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	700 Orang	391 orang	250 Orang	1.018 Orang	407.20%	200 orang	1.236 orang	176.57%
						Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%							
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	700 Orang	391 Jenis	250 Orang	1.100 Orang	440.00%	200 orang	1.274 orang	182.00%
1	05	03	2.04		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	75%	0	10%	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	9 MOU	0	3 MOU	1 MOU	33.33%	0	1 MOU	1/9

E.II-35

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2021			Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	80	77.11	79	79.15	100.19%	79	79.15	98.94%
1 05 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	85%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	71.43%	71.43%
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	2 Dokumen	3 Dokumen	50.00%
1 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	4 Dokumen	5 Dokumen	41.67%
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	6 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	4 Dokumen	4 Dokumen	66.67%
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKM yang disusun	6 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	2 Dokumen	3 Dokumen	50.00%
1 05 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90%	0%	90%	88.74%	98.61%	90.00%	50.00%	55.56%

E.II-36

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2021			Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	42 Kali	0	14 Kali	14 Kali	100.00%	14 Kali	21 Kali	50.00%
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	33.33%
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur BPBD yang mendapatkan Fasilitas pelatihan dan perlengkapan pegawai	100%	0%	100%	111.76%	111.76%	-	111.76%	111.76%
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibeli	122 Paket	0	52 Pasang Sepatu	62 Pasang Sepatu	119.23%	-	62 Pasang Sepatu	50.82%
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	92 Orang	1 Jenis	16 Orang	14 Orang	114.29%	-	14 Orang	15.22%
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	0%	100%	181.58%	181.58%	100.00%	72.60%	72.60%
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	6 Jenis	5 Jenis	9 Jenis	180.00%	5 Jenis	14 Jenis	93.33%

E.II-37

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2021			Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 Jenis	4 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100.00%	5 Jenis	13 Jenis	52.00%
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	9 Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 jenis	100.00%	3 Jenis	6 Jenis	66.67%
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan yang disediakan	6 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 jenis	100.00%	2 Jenis	4 Jenis	66.67%
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	60 Kali	57 kali	20 Kali	47 kali	235.00%	20 kali	18 kali	173.33%
1 05 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan yang tersedia	15%	0%	15%	18.75%	125.00%	0.00%	18.75%	125.00%
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dibeli	21 Jenis	17 jenis	20 Jenis	25 jenis	125.00%	0	25 Jenis	119.05%
1 05 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	0%	100%	105.17%	105.17%	100.00%	72.46%	72.46%
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	36 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	100.00%	12 Bulan	17 Bulan	47.22%
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	3.600 surat	2.374 Surat	1.200 surat	1262 Surat	105.17%	1.200 surat	1.739 surat	48.31%

E.II-38

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan / Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2021			Target Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1	05	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	0	0	0	0	100%	100.00%	100.00%
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label Barang Milik Daerah (BMD)	300 unit	0	0	0	0	250 Unit	37 Unit	12.33%
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	80%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	93.99%	93.99%
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	72 Unit	23 Unit	24 Unit	24 Unit	100.00%	24 Unit	32 Unit	44.44%
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	60 Unit	0	0	0	0	20 Unit	0	0.00%
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	55 Jenis	12 jenis	19 Jenis	19 Unit	100.00%	19 Unit	25 Unit	45.45%
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1225 m2	0	825 m2	825 m2	100.00%	50 m2	865 m2	70.61%

Tabel 2.12
Tabel TC-30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Malang

No	Indikator Kinerja Utama	SPM / Standar Internasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.	Persentase Ketercapaian Indikator kota tangguh bencana	-	-	20%	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Disaster Resilience Scorecard	-	-	-	-	72	97	122	-	-	54	97	122	
2.	Persentase kelurahan tangguh bencana	-	-	8,7% (5 Kel)	-	-	-	-	28%	-	-	-	-	
	Persentase tertanganinya korban bencana	-	-	100%	100%	-	-	-	34,2%	73,63%	-	-	-	
	Persentase penanganan rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana	-	-	30%	30%	-	-	-	29%	17,65%	-	-	-	
	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	-	-	-	0,67%	50%	55%	60%	-	0,23%	83,44%	55%	60%	
3.	Nilai SAKIP	-	-	78	78	79	79	80	-	79,15	Blm di ukur	79	80	
	Nilai SKM pelayanan penanggulangan bencana	-	-	83	-	-	-	-	77,52	-	-	-	-	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penanggulangan bencana merupakan sebuah isu yang tetap sentral ke depannya mempertimbangkan letak geografis dan kondisi atmosfer Kota Malang yang cenderung rawan akan bencana. Letak geografis Kota Malang yang berada di lembah gunung Kawi, Arjuna, dan Semeru yang dialiri oleh lima sungai/kali besar dan puluhan kali-kali kecil menyebabkan Kota Malang rentan akan bencana banjir. Hal ini masih ditambah dengan kondisi iklim yang cenderung basah karena konsentrasi awan hujan yang terperangkap oleh pegunungan di sekitar Kota Malang dan angin lembah yang memicu cuaca ekstrim dan ditambah lagi dengan perubahan iklim sehingga Kota Malang juga rentan akan bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu sudah semestinya setiap unsur dalam lapisan masyarakat menyadari akan hal ini dan bergerak bersama dalam konsep Pentahelix (Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Media Massa) untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya-upaya penanggulangan bencana dengan prioritas akan Pengurangan Risiko Bencana dalam dimensi Pembangunan Berkelanjutan.

Berkenaan dengan upaya menciptakan kolaborasi optimal multi pihak dalam penanggulangan bencana perlu disadari bahwa peran pemerintah selaku motor penggerak, regulator, dan dinamisator haruslah didukung oleh political will dan kebijakan anggaran yang memadai di level pimpinan daerah karena dua hal itu akan mendorong pada peningkatan kualitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku perangkat daerah yang mengampu bidang urusan Penanggulangan Bencana. Political will yang kuat yang berlatar belakang pemahaman yang mencukupi akan pentingnya aspek pengurangan risiko bencana akan secara langsung berdampak positif terhadap kinerja organisasi BPBD karena jika upaya-upaya penanggulangan bencana sudah menjadi prioritas pembangunan daerah maka kapasitas organisasi perangkat daerah berkenaan termasuk diantaranya kompetensi sumber daya manusia dan kecukupan anggarannya akan diperhatikan dan disediakan secara optimal. Kedua hal ini akan memberikan daya ungkit maksimal terhadap kinerja perangkat daerah yang pada akhirnya akan mengoptimalkan pencapaian target kinerja dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pencapaian target kinerja merupakan hal yang krusial mengingat peran perangkat daerah sebagai pemegang kewenangan teknis roda pemerintahan bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini berdasarkan konsep negara demokrasi, rakyat atau warga negara adalah pemegang saham dari negara sehingga mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan optimal yang terbaik dari pemerintah selaku pihak yang diberikan mandatory untuk melaksanakan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Untuk itu telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan kewajiban pemerintah dan hak rakyat akan pelayanan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sub urusan bencana terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Adapun ketiga standar tersebut adalah:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, dengan target capaian 100%;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan target capaian 100%;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan target capaian 100%.

Dari ketiga Standar Pelayanan Minimal pada sub urusan bencana tersebut realisasi capaian targetnya pada tahun 2021 pada BPBD Kota Malang belum mencapai target yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini pun terjadi di tahun sebelumnya yaitu di tahun 2020 dimana realisasi capaian target SPM juga belum mencapai 100%. Adapun tidak tercapainya target dimaksud disebabkan karena dua hal yakni kurangnya dukungan anggaran dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia pelaksananya.

Dukungan anggaran, seperti yang telah disebutkan di awal tadi, menjadi krusial mengingat upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan SPM dimaksud membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai contoh, untuk mewujudkan indikator pencapaian bagi Pelayanan Informasi Rawan Bencana diperlukan dana untuk penyusunan Kajian Risiko Bencana meliputi anggaran untuk tenaga ahli, rapat-rapat, dan diskusi publik sampai dokumen KRB tersebut menjadi sah/legal. Kemudian untuk melakukan aktifitas penyampaian hasil kajian risiko bencana tersebut perlu dana untuk sosialisasi baik secara tatap muka (offline) maupun secara online melalui media sosial dan media massa. Disamping itu juga diperlukan pemasangan rambu-rambu rawan bencana, rambu evakuasi, dan papan informasi publik. Kesemua aktifitas tersebut haruslah dapat mengcover seluruh warga negara yang bermukim di wilayah rawan bencana. Semakin besar wilayah rawan bencana maka semakin besar pula anggaran yang harus disediakan untuk menjalankan aktifitas-aktifitas yang terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tersebut.

Persoalan yang kedua adalah menyangkut kapasitas sumber daya manusia pada BPBD Kota Malang yang sampai saat ini baik secara kuantitas maupun kualitas masih jauh dari harapan karena belum ada standar kompetensi yang ditetapkan bagi aparatur pelaksana perangkat daerah yang mengampu sub urusan bencana, padahal penanggulangan bencana adalah hal yang kompleks yang membutuhkan multi disiplin ilmu, minat yang tinggi, dan pengalaman yang memadai untuk dapat optimal dalam melaksanakan manajemen penanggulangan bencana. Sebagai contoh pada tahapan prabencana yang tugas pokoknya ada pada aspek pengurangan risiko bencana yang selama ini diampu oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana diperlukan sumber daya manusia yang memahami perencanaan wilayah mengingat rentang tugasnya mulai dari penyusunan kajian risiko, pelaksanaan penyebaran informasi, pemantauan bencana, koordinasi multipihak, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk dapat menurunkan risiko bencana di tingkat kota. Faktanya sampai dengan saat ini penetapan personil Aparatur Sipil Negara yang bertugas di BPBD Kota Malang belum memperhatikan kebutuhan dalam optimalisasi penerapan tugas dan fungsi baik dari segi latar belakang pendidikan maupun latar belakang pengalaman sehingga berpengaruh secara langsung dalam rendahnya kinerja organisasi dan capaian target SPM. Lemahnya kompetensi aparatur masih ditambah dengan minimnya kuantitas personil yang ada di perangkat daerah yang mengampu sub urusan bencana ini sehingga walaupun telah diupayakan dipenuhi melalui tenaga non PNS namun berhubung kemampuan anggaran yang terbatas maka sangat terbatas pula ketersediaan sumber daya manusia yang bisa dipenuhi melalui jalur non PNS tersebut.

Selanjutnya perlu juga untuk disampaikan bahwa dalam upaya manajemen bencana ke depan perlu dilakukan penyesuaian dalam kebijakan dan strategi penanggulangan bencana merujuk kepada Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang ditelah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 dan penjabarannya melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020 – 2024. Adapun kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.13
Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana Kota Malang
Tahun 2021 – 2024

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien	a) Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana b) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
2.	Peningkatan sinergi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
3.	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana	a) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana b) Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana c) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering) d) Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana
4.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana
5.	Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Korban Bencana

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Didalam Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan BPBD Kota Malang, BPBD melaksanakan tugas-tugas Penanggulangan Bencana dan tugas-tugas Pemerintah sesuai Peran dan Fungsi Instansi Teknis dibidang Kebencanaan. Adapun analisa kebutuhan anggaran disajikan dalam tabel 2.14 sebagai berikut:

Tabel 2.14
Tabel TC-31.
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				7,856,571,498.00	Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				10,046,117,124.00	
	Sub Urusan Bencana				7,856,571,498.00	Sub Urusan Bencana				10,046,117,124.00	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	5,639,346,498.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	7,601,892,124.00	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	261,936,000.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	261,936,000.00	
a	Sub-kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Malang	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	2 Dokumen	100,446,000.00	Sub-kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Malang	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	2 Dokumen	100,446,000.00	
			2. Jumlah dokumen anggaran	4 Dokumen				2. Jumlah dokumen anggaran	4 Dokumen		
b	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	43,360,000.00	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	43,360,000.00	

E.II-45

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
c	Sub-kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	118,130,000.00	Sub-kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	118,130,000.00	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	4,033,478,203.00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	4,166,533,829.00	
a	Sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	3,994,508,203.00	Sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	4,127,563,829.00	Kebutuhan sesuai Desk tgl 13 Januari 2022 di Hotel Savana
b	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	38,970,000.00	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	38,970,000.00	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	460,357,800.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	689,847,800.00	
a	Sub-kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	10,000,000.00	Sub-kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	10,000,000.00	
b	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	68,510,000.00	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	250,000,000.00	Kebutuhan utk peralatan & perlengkapan di ex telecenter
c	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	225,847,800.00	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	273,847,800.00	

E.II-46

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
d	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Malang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6,000,000.00	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Malang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6,000,000.00	
e	Sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Malang & luar kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	150,000,000.00	Sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Malang & luar kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	150,000,000.00	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD	100%	97,310,000.00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD	100%	1,397,310,000.00	
a	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	300,000,000.00	Kebutuhan anggaran utk 1 unit pick up & 4 unit sepeda motor
b	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	97,310,000.00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	97,310,000.00	
c	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	1,000,000,000.00	Kebutuhan anggaran utk pembangunan gudang logistik, mushola, & sekretariat di area ex telecenter
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	403,553,095.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	403,553,095.00	

E.II-47

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	114,400,000.00	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	114,400,000.00	
b	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	289,153,095.00	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	289,153,095.00	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	382,711,400.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	682,711,400.00	
a	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	221,361,400.00	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	221,361,400.00	
b	Sub-kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kota Malang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	35 Unit	17,500,000.00	Sub-kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kota Malang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	35 Unit	17,500,000.00	
c	Sub-kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	75,250,000.00	Sub-kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	75,250,000.00	
d	Sub-kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	68,600,000.00	Sub-kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	368,600,000.00	utk renovasi kantor BPBD di sawojajar menjadi gedung Pusdalops PB

E.II-48

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
B	Program Penanggulangan Bencana		Indeks Risiko Bencana	85	2,217,225,000.00	Program Penanggulangan Bencana		Indeks Risiko Bencana	85	2,444,225,000.00	
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	243,505,000.00	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	243,505,000.00	
a	Sub-kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1.965 orang	243,505,000.00	Sub-kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan	1965 orang	243,505,000.00	
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	1,196,540,000.00	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	1,423,540,000.00	
a	Sub-kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	653 orang	657,230,000.00	Sub-kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	605 orang	609,230,000.00	

E.II-49

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b	Sub-kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Kota Malang	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota; 2. Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB.	12 dokumen 30.000 orang	282,240,000.00	Sub-kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Kota Malang	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota; 2. Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB.	12 dokumen 30.000 orang	282,240,000.00	
c	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Malang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	551 unit	257,070,000.00	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Malang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	551 unit	257,070,000.00	
d	Sub-kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	15 orang	-	Sub-kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	15 orang	125,000,000.00	Kebutuhan utk pelatihan anggota TRC (merupakan amanat SPM)
e	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Kota Malang	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	-	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Kota Malang	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	150,000,000.00	Merupakan amanat SPM
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	665,690,000.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	665,690,000.00	
			Rata2 waktu tanggap (respond time) bencana	< 60 menit				Rata2 waktu tanggap (respond time) bencana	< 60 menit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a	Sub-kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang	529,200,000.00	Sub-kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang	529,200,000.00	
			Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%				Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%		
b	Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	136,490,000.00	Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	136,490,000.00	
4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	75%	111,490,000.00	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	75%	111,490,000.00	
a	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Kota Malang	1. Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P);	1 dokumen	111,490,000.00	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Kota Malang	1. Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P);	1 dokumen	111,490,000.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Musrenbang biasanya setiap Perangkat Daerah menerima dan menuangkannya usulan-usulan program kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui beberapa tahap. Tahap awal melalui musrenbang tingkat Kelurahan dilanjutkan tingkat Kecamatan baru kemudian tingkat Kota. Di tingkat Perangkat Daerah yang dilakukan adalah dengan melaksanakan forum Perangkat Daerah itu sendiri. Forum Perangkat Daerah ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan tiap tahun yang disesuaikan dengan Renstra Perangkat Daerah itu sendiri, melalui musrenbang ditingkat Kota para pemangku kebijakan yang terdiri atas pemegang kebijakan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota juga para tokoh masyarakat dan organisasi melaksanakan musyawarah dalam menyelaraskan usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga usulan tersebut tidak menyimpang dari renstra yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing kegiatan. Dengan musrenbang ini diharapkan sasaran, lokasi, kegiatan dan anggaran yang direncanakan akan seimbang dan tepat/efektif.

Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tematik, usulan Program, Kegiatan, dan sub-kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023 di Kota Malang untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15
Tabel TC.32Usulan Program, Kegiatan, dan Sub-kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Malang

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/ Usulan (Nama Sub Kegiatan) pada SIPD	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Sumber Usulan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan Senter LED	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	KAMPUNG TANGGUH RW.05 KELURAHAN KARANGBESUKI, Kota Malang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	30	Unit	500,000.00	15,000,000.00	Usulan Pokir H. WANEDI
2	Pengadaan Sepatu boot karet	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	KAMPUNG TANGGUH RW.05 KELURAHAN KARANGBESUKI, Kota Malang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	30	Unit	250,000.00	7,500,000.00	Usulan Pokir H. WANEDI
3	Pengadaan Terpal	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	KAMPUNG TANGGUH RW.05 KELURAHAN KARANGBESUKI, Kota Malang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	Unit	1,000,000.00	10,000,000.00	Usulan Pokir H. WANEDI
4	Pelatihan Search and Rescue (SAR)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Masyarakat rawan bencana di Kota Malang, Kota Malang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	30	Orang	1,000,000.00	30,000,000.00	Usulan Pokir H. AKHDIYAT SYABRIL ULUM S. Kom, MM
5	Pengadaan Senter LED	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Samaan, Kota Malang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	60	Unit	50,000.00	3,000,000.00	Usulan Pokir H. BAYU REKSO AJI
6	Pengadaan Terpal	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Samaan, Kota Malang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2	Unit	1,000,000.00	2,000,000.00	Usulan Pokir H. BAYU REKSO AJI

E.II-53

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/ Usulan (Nama Sub Kegiatan) pada SIPD	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Sumber Usulan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pengadaan Sepatu boot karet	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kel. Samaan, Kota Malang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	6	Unit	250,000.00	1,500,000.00	Usulan Pokir H. BAYU REKSO AJI
8	Pelatihan Search and Rescue (SAR)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jl. Bantaran Terusan 2 RT 02 RW 03, Kota Malang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50	Orang	1,000,000.00	50,000,000.00	Usulan Pokir LELLY THRESIYAWATI
9	Pengadaan Sepatu boot karet	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Relawan Pandanwangi Tangguh, Perumahan Al kausar 11 Kel. Pandanwangi, Malang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	50	Unit	250,000.00	12,500,000.00	Usulan Pokir NURUL FARIDAWATI
10	Pengadaan Senter LED	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan purwantoro rw.4,5,6,8,15,16,17,18, Kota Malang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	8	Buah	500,000.00	4,000,000.00	Usulan Pokir INDAH NURDIANA, STP
11	Pengadaan Terpal	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Brigjen slamet riyadi gg 13 no 421 RT 01 RW 06, Kota Malang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1	Unit	2,000,000.00	2,000,000.00	Usulan Pokir GAGAH SOERYO PAMOEKTI
12	Pengadaan Terpal	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jalan Bareng Raya 2n no 557b RT 12 RW 08, Kota Malang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1	Unit	1,000,000.00	1,000,000.00	Usulan Pokir GAGAH SOERYO PAMOEKTI
13	Pengadaan Terpal	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jl Hassanudin belakang 44 RT 04 RW 01 SAMAAAN, Kota Malang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2	Buah	1,000,000.00	2,000,000.00	Usulan Pokir GAGAH SOERYO PAMOEKTI
14	Pelatihan Search and Rescue (SAR)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jln.Bandara Palmerah IX Blok I no 16A perum villa gunung burung cemoro kandang RT 01 RW 08 KEDUNGKANDANG, Kota Malang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	20	Orang	1,000,000.00	20,000,000.00	Usulan Pokir GAGAH SOERYO PAMOEKTI
TOTAL USULAN POKIR								160,500,000.00	

E.II-54

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/ Usulan (Nama Sub Kegiatan) pada SIPD	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Sumber Usulan)
									1. Usulan Musrenbang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Pelatihan pemetaan kawasan rawan bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	KNPI Kota Malang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25	orang	1,000,000.00	25,000,000.00	Usulan Musrenbang Tematik
16	Pelatihan Pencegahan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	KNPI Kota Malang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25	orang	1,000,000.00	25,000,000.00	Usulan Musrenbang Tematik
17	Pelatihan Search and Rescue (SAR)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	KNPI Kota Malang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25	orang	1,000,000.00	25,000,000.00	Usulan Musrenbang Tematik
18	Sosialisasi dan Simulasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	IPPNU Kota Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	450	orang	75,000.00	33,750,000.00	Usulan Musrenbang Tematik
19	Sosialisasi dan Simulasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	YPAC Kota Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	415	orang	75,000.00	31,125,000.00	Usulan Musrenbang Tematik

E.II-55

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/ Usulan (Nama Sub Kegiatan) pada SIPD	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Sumber Usulan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Sosialisasi dan Simulasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Bhakti Luhur Kota Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500	orang	75,000.00	37,500,000.00	Usulan Musrenbang Tematik
21	Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Bareng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	20	orang	1,000,000.00	20,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Klojen
22	Pelatihan Search and Rescue (SAR)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	20	orang	1,000,000.00	20,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Klojen
23	Pelatihan Pencegahan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	20	orang	1,000,000.00	20,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Klojen
24	Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	20	orang	1,000,000.00	20,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Klojen

E.II-56

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/ Usulan (Nama Sub Kegiatan) pada SIPD	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Sumber Usulan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Pelatihan Pencegahan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Gading Kasri	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25	orang	1,000,000.00	25,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Klojen
26	Pelatihan Pencegahan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Penanggungan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25	orang	1,000,000.00	25,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Klojen
27	Pelatihan Pencegahan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Bareng	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25	orang	1,000,000.00	25,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Klojen
28	Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Samaan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25	orang	1,000,000.00	25,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Klojen
29	Pengadaan Rambu Rawan Bencana	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	1,000,000.00	10,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Klojen
30	Pengadaan Rambu Rawan Bencana	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Gading Kasri	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	1,000,000.00	10,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Klojen
31	Pengadaan Senter LED	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Gading Kasri	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	500,000.00	5,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Klojen
32	Pengadaan Sepatu boot karet	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Bareng	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	250,000.00	2,500,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Klojen
33	Pengadaan Rainsuit	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Bareng	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	500,000.00	5,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Klojen

E.II-57

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/ Usulan (Nama Sub Kegiatan) pada SIPD	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Sumber Usulan)
									1. Usulan Musrenbang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Purwantoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	30	orang	1,000,000.00	30,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Blimbing
35	Pelatihan Pencegahan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Polehan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	20	orang	1,000,000.00	20,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Blimbing
36	Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Blimbing	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	20	orang	1,000,000.00	20,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Blimbing
37	Pelatihan Pencegahan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Bunulrejo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25	orang	1,000,000.00	25,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Blimbing
38	Pelatihan Search and Rescue (SAR)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Blimbing	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	20	orang	1,000,000.00	20,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Blimbing
39	Pengadaan Rambu Rawan Bencana	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Purwantoro	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	1,000,000.00	10,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Blimbing
40	Pengadaan Senter LED	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Purwantoro	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	6	unit	500,000.00	3,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Blimbing

E.II-58

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/ Usulan (Nama Sub Kegiatan) pada SIPD	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Sumber Usulan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Pengadaan Rainsuit	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Polehan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	15	unit	500,000.00	7,500,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Blimbing
42	Pengadaan Senter LED	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Polehan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	15	unit	500,000.00	7,500,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Blimbing
43	Pengadaan Sepatu boot karet	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Polehan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	15	unit	250,000.00	3,750,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Blimbing
44	Pengadaan Sepatu boot karet	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Blimbing	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	20	unit	250,000.00	5,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Blimbing
45	Pengadaan Rainsuit	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Arjosari	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	500,000.00	5,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Blimbing
46	Pengadaan Senter LED	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Arjosari	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	500,000.00	5,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Blimbing
47	Pengadaan Sepatu boot karet	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Arjosari	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	250,000.00	2,500,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Blimbing

E.II-59

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/ Usulan (Nama Sub Kegiatan) pada SIPD	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Sumber Usulan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Tlogomas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	25	orang	1,000,000.00	25,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Lowokwaru
49	Pelatihan Pencegahan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Tasik Madu	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	21	orang	1,000,000.00	21,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Lowokwaru
50	Pelatihan pemetaan kawasan rawan bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Merjosari	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	20	orang	1,000,000.00	20,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Lowokwaru
51	Penyediaan Sistem Peringatan Dini Banjir	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tlogomas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	30,000,000.00	30,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Lowokwaru
52	Pengadaan Rambu Rawan Bencana	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Tulusrejo	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	6	unit	1,000,000.00	6,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Lowokwaru
53	Pengadaan Senter LED	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Tulusrejo	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	3	unit	500,000.00	1,500,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Lowokwaru
54	Pengadaan Senter LED	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Tlogomas	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2	unit	500,000.00	1,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Lowokwaru

E.II-60

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/ Usulan (Nama Sub Kegiatan) pada SIPD	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Sumber Usulan)
									1. Usulan Musrenbang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Pengadaan Rainsuit	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Jatimulyo	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	15	unit	500,000.00	7,500,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Lowokwaru
56	Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Bandulan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	25	orang	1,000,000.00	25,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
57	Sosialisasi dan Simulasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500	orang	75,000.00	37,500,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
58	Pelatihan Pencegahan Bencana	Pelatihan Pencegahan Bencana	Kelurahan Sukun	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	20	orang	1,000,000.00	20,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
59	Pelatihan Search and Rescue (SAR)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25	orang	1,000,000.00	25,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun

E.II-61

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/ Usulan (Nama Sub Kegiatan) pada SIPD	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Sumber Usulan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25	orang	1,000,000.00	25,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
61	Pelatihan Pencegahan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	20	orang	1,000,000.00	20,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
62	Pelatihan Search and Rescue (SAR)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	20	orang	1,000,000.00	20,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
63	Pelatihan pemetaan kawasan rawan bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	20	orang	1,000,000.00	20,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
64	Penyediaan Sistem Peringatan Dini Banjir	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	30,000,000.00	30,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
65	Pengadaan Rainsuit	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Sukun	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	500,000.00	5,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
66	Pengadaan Sepatu boot karet	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Sukun	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	250,000.00	2,500,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
67	Pengadaan Rainsuit	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	20	unit	500,000.00	10,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
68	Pengadaan Sepatu boot karet	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	20	unit	250,000.00	5,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun

E.II-62

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/ Usulan (Nama Sub Kegiatan) pada SIPD	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Sumber Usulan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	Pengadaan Senter LED	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	20	unit	500,000.00	10,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
70	Pengadaan Rainsuit	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	7	unit	500,000.00	3,500,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
71	Pengadaan Sepatu boot karet	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	7	unit	250,000.00	1,750,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
72	Pengadaan Senter LED	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	7	unit	500,000.00	3,500,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
73	Pengadaan Sepatu boot karet	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	250,000.00	2,500,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
74	Pengadaan Rainsuit	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	500,000.00	5,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
75	Pengadaan Senter LED	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	500,000.00	5,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
76	Pengadaan Rambu Rawan Bencana	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	1,000,000.00	10,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Sukun
77	Pelatihan Pencegahan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Sawojajar	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	26	orang	1,000,000.00	26,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Kedungkandang

E.II-63

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/ Usulan (Nama Sub Kegiatan) pada SIPD	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Sumber Usulan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	Pelatihan Pencegahan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	10	orang	1,000,000.00	10,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Kedungkandang
79	Pelatihan Pencegahan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kelurahan Wonokoyo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	26	orang	1,000,000.00	26,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Kedungkandang
80	Penyediaan Sistem Peringatan Dini Banjir	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Kotalama	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	30,000,000.00	30,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Kedungkandang
81	Pengadaan Senter LED	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	500,000.00	5,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Kedungkandang
82	Pengadaan Sepatu boot karet	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	250,000.00	2,500,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Kedungkandang
83	Pengadaan Rainsuit	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	unit	500,000.00	5,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Kedungkandang
84	Pengadaan Rambu Rawan Bencana	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Kotalama	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1	unit	1,000,000.00	1,000,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Kedungkandang
85	Pengadaan Sepatu boot karet	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Kotalama	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	15	unit	250,000.00	3,750,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Kedungkandang

E.II-64

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/ Usulan (Nama Sub Kegiatan) pada SIPD	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Sumber Usulan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	Pengadaan Rainsuit	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Kotalama	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	15	unit	500,000.00	7,500,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Kedungkandang
87	Pengadaan Senter LED	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kelurahan Kotalama	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	15	unit	500,000.00	7,500,000.00	Usulan Musrenbang Kecamatan Kedungkandang
TOTAL USULAN MUSRENBANG								1,076,625,000.00	
TOTAL								1,237,125,000.00	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun yang dimaksud telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi pemerintah daerah. Oleh karena itu kebijakan Perangkat Daerah sedapat mungkin bahkan harus selaras, terpadu dan sinkron dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahkan dengan kebijakan nasional (Pemerintah pusat).

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait termasuk Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai aturan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Sedangkan landasan konstitusional penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pada pasal 2 adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas: a) kemanusiaan; b) keadilan; c) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d) keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; e) ketertiban dan kepastian hukum; f) kebersamaan; g) kelestarian lingkungan hidup; dan h) ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara prinsip – prinsip penanggulangan bencana mencakup: a) prinsip cepat dan tepat; b) prioritas; c) koordinasi dan keterpaduan; d) berdaya guna dan berhasil guna; e) transparansi dan akuntabilitas; f) kemitraan; g) pemberdayaan; h) non diskriminatif; dan i) non proletisi.

Selanjutnya dalam pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini sesuai ketentuan pasal 6 pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 meliputi : a) pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d) pemulihan kondisi dari dampak bencana; e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai/on call; dan g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.

Adapun arahan kebijakan dan strategis BNPB Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Arah Kebijakan dan Strategi BNPB 2020-2024

Arah kebijakan	Strategi
1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.	Penguatan sistem, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.	Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.	Penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.	Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.	Penguatan tata kelola logistik dan peralatan nasional.
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana, BPBD selain mengacu kepada kebijakan di Pemerintah Kota Malang juga memperhatikan dan selaras dengan kebijakan-kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat (BNPB dan Kementerian Dalam Negeri) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.2
Prioritas Nasional

Prioritas Nasional
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tabel 3.3
Prioritas Provinsi

Prioritas Provinsi
1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur
3. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal

5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumberdaya energi
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur

Tabel 3.4
Prioritas Daerah

Prioritas Daerah
1. Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif
2. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera
3. Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat
4. Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan prioritas nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
6. Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPBD Kota Malang masuk ke dalam Prioritas Nasional 6 membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Untuk Prioritas Provinsi BPBD Kota Malang masuk ke dalam prioritas 6 Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup serta masuk ke Prioritas Daerah 5 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kota Malang Tahun 2023

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Apabila mengacu pada visi misi Kepala Daerah Kota Malang, RPJMD Kota Malang serta Renstra BPBD Kota Malang Tahun 2018-2023, maka Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kota Malang Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Tujuan
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana
2. Sasaran
 - a. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana
 - b. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Program, kegiatan dan sub-kegiatan Renja BPBD Tahun 2023
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sub-kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - c) Sub-kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - a) Sub-kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - b) Sub-kegiatan Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi.
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sub-kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e) Sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Sub-kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Sub-kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c) Sub-kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Sub-kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - c) Sub-kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Sub-kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b. Program Penanggulangan Bencana:
- 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
 - a) Sub-kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
 - 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - a) Sub-kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
 - b) Sub-kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
 - c) Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;

- d) Sub-kegiatan Rencana Kontijensi.
- 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - a) Sub-kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - b) Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota.
- 4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - a) Sub-kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.

Untuk rincian daftar usulan program/kegiatan/sub-kegiatan Renja BPBD beserta anggarannya pada tahun 2023 tercantum dalam Bab IV pada tabel TC-33.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tabel Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan sebagai berikut (Tabel TC-33)

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab Perangkat Daerah.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumberdaya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah yang berwawaskan Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Selain itu pola perencanaan pembangunan tentunya harus menyeimbangkan peran antara perempuan dan laki-laki, oleh karena itu kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

E.IV-73

Tabel 4.1

TABEL TC - 33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
KOTA MALANG

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR				10.116.571.498,00				13.256.000.000,00
1	05				SUB URUSAN BENCANA				10.116.571.498,00				13.256.000.000,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu		100%	7.220.173.097,00			100%	9.056.000.000,00
1	05	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan		100%	353.480.000,00			100%	400.000.000,00
1	05	01	2.01	01	Sub-kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	Kota Malang	2 Dokumen	213.360.000,00	APBD		2 Dokumen	150.000.000,00
						2. Jumlah dokumen anggaran		4 Dokumen				4 Dokumen	

E.IV-74

1	05	01	2.01	06	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	4 Laporan	48.200.000,00	APBD		4 Laporan	100.000.000,00
1	05	01	2.01	07	Sub-kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	2 Laporan	91.920.000,00	APBD		2 Laporan	150.000.000,00
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu		100%	4.414.298.202,00			100%	4.675.000.000,00
1	05	01	2.02	01	Sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	22 orang	4.375.328.202,00	APBD		30 orang	4.600.000.000,00
1	05	01	2.02	05	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Malang	1 Laporan	38.970.000,00	APBD		1 Laporan	75.000.000,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian		100%	185.000.000,00	100%			185.000.000,00
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Malang	60 Paket	45.000.000,00			60 Paket	45.000.000,00
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Malang	60 Orang	140.000.000,00			60 Orang	140.000.000,00
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi		100%	514.998.900,00			100%	771.000.000,00

E.IV-75

1	05	01	2.06	01	Sub-kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Malang	2 paket	10.000.000,00	APBD		2 paket	15.000.000,00
1	05	01	2.06	02	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Malang	3 paket	78.721.000,00	APBD		6 paket	250.000.000,00
1	05	01	2.06	04	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Malang	3 paket	265.379.900,00	APBD		3 paket	300.000.000,00
1	05	01	2.06	06	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Malang	2 Dokumen	6.000.000,00	APBD		2 Dokumen	6.000.000,00
1	05	01	2.06	09	Sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Malang & luar Kota Malang	12 laporan	154.898.000,00	APBD		12 laporan	200.000.000,00
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD		100%	829.818.000,00			100%	1.600.000.000,00
1	05	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Malang	1 unit	212.608.000	APBD		2 unit	500.000.000,00
1	05	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Malang	7 unit	217.210.000,00	APBD		5 unit	600.000.000,00
1	05	01	2.07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Malang	2 unit	400.000.000	APBD		1 unit	500.000.000,00
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti		100%	424.524.480,00			100%	475.000.000,00

E.IV-76

1	05	01	2.08	02	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Malang	12 laporan	150.000.000,00	APBD		12 laporan	175.000.000,00
1	05	01	2.08	04	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Malang	12 laporan	274.524.480,00	APBD		12 laporan	300.000.000,00
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100%	498.053.515,00			100%	950.000.000,00
1	05	01	2.09	02	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Malang	25 Unit	354.161.400,00	APBD		25 Unit	275.000.000,00
1	05	01	2.09	05	Sub-kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Malang	20 Unit	17.980.000,00	APBD		50 Unit	50.000.000,00
1	05	01	2.09	06	Sub-kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Malang	106 Unit	75.912.115,00	APBD		120 Unit	125.000.000,00
1	05	01	2.09	09	Sub-kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Malang	1 unit	50.000.000,00	APBD		2 unit	500.000.000,00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana		85	2.896.398.401,00			85	4.200.000.000,00

E.IV-77

1	05	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana		100%	219.004.700,00			100%	500.000.000,00
1	05	03	2.01	02	Sub-kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Kota Malang	1.930 orang	219.004.700,00	APBD		5.000 orang	500.000.000,00
1	05	03	2.02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		100%	1.660.410.001,00			100%	2.050.000.000,00
1	05	03	2.02	02	Sub-kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kota Malang	700 orang	807.120.000,00			1.000 orang	1.000.000.000,00
1	05	03	2.02	03	Sub-kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota;	Kota Malang	12 dokumen	285.290.000,00	APBD		12 dokumen	450.000.000,00

E.IV-78

						2. Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB.		30.000 orang				32.000 orang	
1	05	03	2.02	04	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Kota Malang	853 unit	508.000.001,00	APBD		570 jenis	300.000.000,00
1	05	03	2.02	09	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	Kota Malang	1 dokumen	60.000.000	APBD		2 dokumen	300.000.000,00
1	05	03	2.03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi		100%	764.614.700,00			100%	1.500.000.000,00
						Rata2 waktu tanggap (respond time) bencana		< 60 menit					
1	05	03	2.03	03	Sub-kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kota Malang	250 Orang	529.333.000,00	APBD		500 orang	1.000.000.000,00
						Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik		100%					
1	05	03	2.03	04	Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Malang	200 Orang	235.281.700,00	APBD		500 orang	500.000.000,00
1	05	03	2.04		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun		75%	252.369.000,00			50%	150.000.000,00
1	05	03	2.04	06	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	1. Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui	Kota Malang	1 dokumen	252.369.000,00	APBD		1 dokumen	150.000.000,00

						Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P);								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E.IV-80

Tabel 4.2

PEMETAAN SUB KEGIATAN SESUAI KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021

No. (1)	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)												
	Kode (2)					Sub Kegiatan (3)	Indikator (4)	Target (5)	Satuan (6)	Kode (7)					Sub Kegiatan (8)	Indikator (9)	Target (10)	Satuan (11)
1	1	05	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100	%	1	05	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100	%
2	1	05	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	1	05	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen
3	1	05	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1	05	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen
4						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	05	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen
5						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerapan Anggaran			1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerapan Anggaran	90	%
6						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1	05	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang
7						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	05	01	2.02	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah			1	05	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	%

E.IV-81

No. (1)	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)												
	Kode (2)					Sub Kegiatan (3)	Indikator (4)	Target (5)	Satuan (6)	Kode (7)					Sub Kegiatan (8)	Indikator (9)	Target (10)	Satuan (11)
						Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1	05	01	2.03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercukupan sarana prasarana kantor			1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercukupan sarana prasarana kantor	5	Paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	05	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	05	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	05	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1	05	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Dokumen
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1	05	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Dokumen
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah sesuai RKBMD			1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah sesuai RKBMD	100	%
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1	05	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit

E.IV-83

No. (1)	Lama						Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)												
	Kode (2)					Sub Kegiatan (3)	Indikator (4)	Target (5)	Satuan (6)	Kode (7)					Sub Kegiatan (8)	Indikator (9)	Target (10)	Satuan (11)	
						PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
						Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota													
1	1	05	03	2.01	03	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	1.000	Orang	1	05	03	2.01	02	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	2.000	orang	
2	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	%	1	05	03	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100	%	
3						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	730	Orang	1	05	03	2.02	2	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	700	orang	
4						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	10.000	Orang	1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	dokumen	

E.IV-84

No. (1)	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)												
	Kode (2)					Sub Kegiatan (3)	Indikator (4)	Target (5)	Satuan (6)	Kode (7)					Sub Kegiatan (8)	Indikator (9)	Target (10)	Satuan (11)
										1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
						Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana												
						Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota												
						Penyusunan Rencana Kontijensi												
						Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana												
						Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota												
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota												
						Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana												
5						Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	100	KK						Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1	dokumen

BAB V
PENUTUP

A. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Kode Program/Kegiatan/Sub-kegiatan pada Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang (termasuk indikatornya) telah mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- c. Program/kegiatan/sub-kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dan selaras dengan Perubahan RPJMD Kota Malang;
- d. Usulan yang berasal dari masyarakat maupun dari stakeholder terkait melalui forum Musrenbang telah sebagian besar diakomodir dalam beberapa sub-kegiatan berkenaan dan telah tercermin dalam alokasi anggaran dalam sub-kegiatan yang bersangkutan.

B. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Oleh karena RPJMD Kota Malang merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dalam menyusun rencana kerja tahunan berpedoman pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana RKPD ini adalah implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

2. Renstra Perangkat Daerah yang menjadi acuan dari Rencana Kerja (Renja) sudah disusun dengan memperhatikan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB);

C. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan/optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan penyusunan rencana selanjutnya;
2. Meningkatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat, ormas, lembaga usaha (swasta) dan lembaga non pemerintah termasuk perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mampu menumbuhkembangkan masyarakat yang tanggap, tangkas, tangguh dan mandiri dalam menghadapi bencana yang ada, sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai koordinator, motivator dan fasilitator;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat khususnya yang berada pada wilayah/daerah rawan dan berpotensi bencana, sehingga menjadi masyarakat yang semakin tanggap, tangkas dan tangguh dalam menghadapi dan menangani bencana, dengan cara mengembangkan dan meningkatkan segala kemampuan/daya upaya yang ada, baik kapasitas SDM, kelengkapan dan ketersediaan sarana prasarana serta adanya dukungan dana dan partisipasi semua pihak terkait kebencanaan (LSM/Ormas/Lembaga Usaha) pada semua tahapan penanggulangan bencana.
4. Sumbang saran, pemikiran dan informasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait (*stakeholders*) sangat dibutuhkan agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah;